

BAB III

PASAR TEKSTIL INDIA DI UNI EROPA: HAMBATAN EKSPOR DAN MUNCULNYA ISU LINGKUNGAN

Uni Eropa merupakan pasar utama bagi berbagai produk India termasuk tekstil. Dengan fokus penulis pada hambatan non tarif, ekspor tekstil India mengalami penurunan ke Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Pada BAB III penulis menekankan salah satu penyebab eksternal dari penurunan ekspor tekstil ke Uni Eropa yang dikarenakan adanya perubahan preferensi masyarakat di kawasan atas produk-produk yang mengedepankan *sustainability*. Penetapan standar oleh Uni Eropa, negara anggota individu dan perusahaan di kawasan tersebut berkontribusi dalam menurunnya kapasitas ekspor tekstil India. Permintaan tekstil global dan fenomena *fast fashion* memang menuntun berbagai negara produsen pada keterbukaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Seiring waktu, publik mulai menyadari realitas bahwa pola produksi dan konsumsi dalam lingkaran tekstil tidak berkelanjutan, menjadi penyebab berkurangnya biodiversitas, penumpukan sampah serta perubahan iklim. Dari adanya rasionalitas tersebut, komunitas internasional setuju bahwa mereka harus merubah pola produksi-konsumsi dalam rantai ekonomi global.

A. Uni Eropa sebagai Pasar Terbesar Tekstil India

India merupakan salah satu pusat manufaktur tekstil terbesar dan eksportir tekstil kedua terbesar di dunia. Uni Eropa (UE) merupakan tujuan primer dari ekspor India yang menerima hampir 60% produk tekstil negara tersebut (Barrie, 2019). India merupakan eksportir keempat terbesar yang menyumbangkan 6% total impor ke kawasan tersebut sebesar \$89 miliar (Wazir Advisors, 2016). Sebanyak 13.5% total perdagangan India mengalir ke Uni Eropa yang menjadikan kawasan tersebut sebagai *partner* dagang utama India. Sementara bagi Uni Eropa, India merupakan sekutu dagang terbesar ke-9. India setidaknya berkontribusi terhadap 22% ekspor tekstil dan 43% pakaian jadi di pasar Eropa. Uni Eropa juga merupakan investor terbesar bagi sektor tekstil India setelah Mauritius dengan stok investasi mencapai €51.2 miliar tahun 2015 (EEAS, 2017). Perjanjian bilateral terkait perdagangan tekstil dengan Uni Eropa mulai terjalin secara intens sejak penandatanganan nota kesepahaman dalam *EU-India Cooperation Agreement* pada Desember 1994. Nota kesepahaman ini memungkinkan pemberian kuota impor lebih di bawah *Uruguay Round's Agreement on Textiles and Clothing* (European Commission, 2019).

Pada Januari 1995, Uni Eropa juga setuju untuk menghapus semua hambatan perdagangan pada produk *handloom* dan *cottage* sesuai yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian perdagangan tekstil India-Uni Eropa. Berkat adanya sejumlah kesepakatan tersebut, ekspor tekstil India tahun 2002 ke 15 negara anggota Uni Eropa menapakai \$7.19 miliar dari total \$20,9 miliar ekspor tekstil di seluruh dunia (*lihat gambar di bawah*) (Saini, 2012). Sesuai

peraturan penerimaan kuota impor yang ditetapkan *World Trade Organization* (WTO), Uni Eropa menerima 7.000 - 8.000 ton ekspor tekstil India hingga tahun 2004. Dalam perjanjian bilateral, Uni Eropa juga menerima 2.500 - 3.000 ton tekstil India pada tahun sebelumnya terlepas dari kuota yang ditetapkan WTO (European Communities, 1994).

Tabel 3.1 Top 5 Destinasi Ekspor Tekstil India Tahun 2002

No.	Partner Name	Export Value (\$million)
	World	20,969,201
1	EU15	7,118,106
2	USA	4,660,667
3	United Arab Emirates	1,262,704
4	China	988,277
5	Turkey	669,228

Sumber: World Integrated Trade Solution, UN Comtrade 2002. Diolah oleh Gordhan K. Saini, 2012

Selama Januari-Juni 2006, India menempati urutan ketiga ekspor tekstil ke Uni Eropa dengan persentase saham mencapai 8.1% di bawah China dan Turki. Tahun 2007-8, setidaknya tiga negara anggota Uni Eropa yakni Inggris, Jerman, dan Prancis menjadi negara *Top 5* tujuan ekspor pakaian jadi India terbanyak dengan presentase total gabungan ekspor produk rajutan dan anyaman (*knit and woven*) 27.57% setelah Amerika Serikat 30.54% (Malagi, 2013).

Tabel 3.2 Persentase Ekspor India ke-5 Negara Tujuan Utama 2007-8

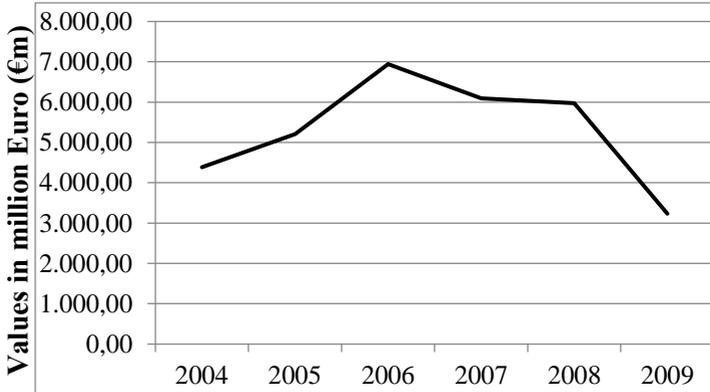
	% Share in different Types		
	All	Knit	Woven
World	100	100	100
USA	30.54	29.84	31.07
UK	12	10.78	12.95
Germany	8.31	11.05	6.22
France	7.26	8.27	6.48
UAE	6.79	5.69	7.63
<i>European Countries (UK, Germany, France) Combined</i>			
	27.57	30.1	26.8

Sumber: Apparel Export Promotion Council

Pada rentang tahun 2007-10, sejumlah desainer asal Prancis, Jerman dan Inggris memulai usaha patungan dengan para desainer India yang mendorong produktivitas dan pasar ekspor. Perusahaan-perusahaan Italia juga berinvestasi sebanyak USD252.7 miliar bersama India Inc. Carrera dalam upaya ekspansi kapasitas dan manufaktur tekstil India (Nakkeeran & Pugalendhi, 2010). Sebelumnya, ekspor tekstil India sempat mengalami penurunan sejak *Multi Fiber Agreement* (MFA) tahun 1974 ditetapkan untuk membatasi produk kain berbahan kapas yang pada dasarnya hanya ditujukan untuk melindungi produk domestik negara-negara maju. Setelah MFA berakhir pada Januari 2005, ekspor India memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor tekstil berbahan kapas dengan diperbarunya *Agreement on Textile and Clothing* (ATC). Pada rentang waktu tahun 2004 – 2009, ekspor benang, kain, dan pakaian jadi ke Uni Eropa mengalami fluktuasi terutama di tahun 2005-6 namun kembali mengalami penurunan tahun 2008-9 yang

disebabkan oleh resesi global dan pembaruan kerja sama yang mengalami stagnasi (Manoj, 2014).

Grafik 3.1 Ekspor Tekstil India ke Uni Eropa tahun 2004-09



Sumber diolah oleh Nakkeeran & Pugalendhi, 2010

Beberapa kuartal pasca resesi global, ekspor tekstil mulai berada diangka stabil namun kembali mengalami perlambatan di awal 2013 ketika Uni Eropa mengukuhkan perjanjian tekstil dengan Bangladesh pasca tragedi Rana Plaza. Tahun 2016, Uni Eropa mengimpor sebanyak 19.8% tekstil India dari total keseluruhan impor barang dari negara tersebut (EEAS, 2017). Namun, angka itu turun dari tahun sebelumnya karena hingga tahun tersebut peringkat India sebagai eksportir tekstil global turun menjadi posisi ke-5 (Mukherjee, Paul, Sarma, & Sinha, 2019). Pada 2016, sektor tekstil yang menyumbangkan pendapatan nasional kedua terbesar di India berada di titik rendah dengan total ekspor global berada di angka USD19.1 miliar atau turun USD22.3 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara ekspor kapas turun dari \$4.5

miliar tahun 2013-14 menjadi \$3.4 miliar tahun 2017-18 (Suneja, 2019). Ekspor tekstil secara keseluruhan turun dari 51% di tahun 2017 menjadi 45% atau sekitar 7% di awal tahun 2019 (Parashar, 2019). Turunnya kapasitas ekspor kapas dan pabrik ini mempengaruhi keseluruhan rantai produksi tekstil termasuk hilangnya lapangan kerja mulai dari agrikultur (kapas) hingga barang jadi (Suneja, 2019).

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang baru dengan spesifikasi kerangka *Broad-based Investments and Trade Agreement* (BTIA) antara India dan Uni Eropa telah dibahas sejak tahun 2007. Namun tahun 2013 setelah melewati 16 kali negosiasi, perjanjian yang baru belum mencapai kesepakatan dan mengalami stagnasi. Duta besar UE untuk India, Tomasz Kozlowski mengatakan bahwa Parlemen Eropa tidak akan menindaklanjuti FTA apabila sektor *automobile* tidak disepakati (The Hindu Business Line, 2019). Selain itu, pertimbangan pengurangan tariff impor yang disisipi klausul lingkungan, sosial dan hak asasi manusia dirasa tidak akan tercapai. Dari persepektif Uni Eropa, negosiasi perdagangan dan sejumlah kerja sama harus dilandasi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan klausul sosial dan lingkungan yang mana India mengatakan keberata untuk memasukan klausul-klausul tersebut dalam perjanjian perdagangan pada awalnya (Khorana, 2019).

Pada tahun 2016 dalam *EU-India Summit*, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, menekankan dukungan keberlanjutan negosiasi yang didasarkan pada sejumlah isu yang dikaitkan dengan *EU's New Trade Strategy*. Melalui kerangka yang dikeluarkan *European Trade Commissioner* (ETC) tersebut, Cecilia Malmström sebagai kepala ETC pada November 2015 berjanji untuk

menindaklanjuti kerja sama dengan India yang dapat memberi kesempatan akses nol percent pada tariff impor. Inisiatif dagang ini diproyeksikan sebagai agenda lima tahun untuk menciptakan lapangan kerja di Uni Eropa sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia (Nataraj, 2016). Agenda promosi pembangunan berkelanjutan dari Uni Eropa inilah yang seharusnya menjadi patokan tekstil India dalam berinteraksi bisnis.

Kepala dewan *Cotton Textile Export Promotion*, R.K. Dilma menegaskan bahwa apabila FTA terbaru tidak kunjung disepakati maka beberapa sektor dalam India akan terus mengalami penurunan (Jha, 2016). Tahun 2018, pembicaraan bilateral dimulai lagi melalui *Strategic Partnership* namun hanya bentuk penguatan hubungan, belum sampai membahas perjanjian ekspor-impor (Khorana, 2019). Melalui pembentukan *free trade agreements* (FTA) yang baru dengan UE, ekspor tekstil India akan berkesempatan memperoleh harga kompetitif dan meningkatkan kapasitas ekspor.

B. Hambatan Ekspor Tekstil India di Uni Eropa Terkait Isu Lingkungan & Sosial

Meskipun menjadi industri kedua terbesar, industri tekstil di India merupakan salah satu industri paling terdisintegrasi. Lemahnya hukum ketenagakerjaan memicu banyaknya eksploitasi buruh yang terlibat dalam jam kerja panjang tanpa standar upah minimum yang jelas. Selain itu, kondisi tempat kerja yang kurang memadai membuat buruh tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan dan area terbuka yang cukup. Pengelolaan limbah dan konsumsi masif dari bahan kimia dan batubara

juga memperburuk degradasi lingkungan di sekitar pabrik-pabrik tekstil yang beroperasi (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016). Akibatnya, tanah, udara dan air bersih menjadi tercemar yang mengganggu kesehatan warga sekitar.

Isu lingkungan dan sosial (perdagangan yang adil, regulasi ketenagakerjaan, dsb) mulai menjadi *highlight* ketika Uni Eropa, AS, dan beberapa negara maju lain mulai memasukannya sebagai hambatan non-tariff tahun 2005-6 dengan pengertian bahwa negara-negara tersebut mempertimbangkan produk dari negara yang memiliki preferensi terhadap lingkungan-sosial (Kumar, Begum, & Das, 2018). Dari adanya berbagai masalah regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan, ekspor India ke Uni Eropa mengalami kendala seiring organisasi supranasional tersebut mengangkat isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam area kerja samanya dengan entitas lain yang tercantum dalam laporan *the Trade Sustainability Impact Assessment* tahun 2009 pasca pertemuan sejumlah LSM Uni Eropa dan India dalam pembahasan FTA melalui *civil society bilateral meetings* (The European Commission, 2009).

Survei *Organization for Economic Co-operation and Development/OECD* tahun 2005 mengidentifikasi pencantuman label, standar teknis, ukuran *anti-dumping*, dan hukum mengenai pekerja anak merupakan hambatan-hambatan kritical ekspor ke Uni Eropa. Oleh karena klausul lingkungan dan sosial yang dibawa Uni Eropa, perjanjian dagang yang baru (FTA) antara India-Uni Eropa mengalami hambatan sejak tahun 2007. Studi lain juga menyebutkan bahwa aturan non-preferensi dan diskriminasi atau diidentifikasi sebagai *non-tariff barriers* dalam sektor tekstil merupakan hambatan utama India ke

Uni Eropa (Khorana & Soo, 2016). Adanya standar-standar impor yang dikeluarkan pasar internasional khususnya Uni Eropa di atas secara lebih lebar dikonsepsikan sebagai hambatan legislatif eksternal.

Dalam ekspor ke Uni Eropa, beberapa pengamat menyebut hambatan ekspor tekstil India ke kawasan tersebut sebagian besar dilandasi atas kurangnya pemahaman akan komitmen aktivitas internasional dalam pasar global (Khorana & Soo, 2016). Meskipun MFA telah hangus di tahun 2005, di tahun yang sama Uni Eropa justru semakin menggencarkan larangan-larangan impor seperti anti-dumping, isu iklim, norma ketenagakerjaan hingga kesejahteraan hewan. Brand-brand ternama seperti Levi's, Tom Hilfiger, Ann Taylor dan Mexx sempat memutus kerja sama dengan sejumlah eksportir India setelah pemerhati internasional *Clean Cloth Campaign* dan *Labor Union Federations* yang berbasis di Brussels mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap hak buruh tekstil di tahun 2008 (Saini, 2012).

Komisi Eropa bahkan mengatakan bahwa penurunan kuota impor disebabkan oleh lemahnya tekstil India dalam memenuhi standar internasional mengenai lingkungan (European Commission, 2019). Standar internasional tersebut seperti tekstil berbahan kapas tidak boleh mengandung kromium dan sulfide di atas pH 2 serta phenolics di atas Ph 5 sementara dalam teknik pewarnaan dilarang untuk melebihi Ph 9.3-13 dan berbagai aturan lain (Narayanan, 2018). Importir dari Uni Eropa yang tergabung dalam *Leather and Footwear Industry* umumnya mendesak penyuplai untuk menekan batas penggunaan terhadap bahan kimia berdasarkan *EU's Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals* (REACH), persyaratan pengujian dan

sertifikasi serta pengemasan dan pengolahan limbah yang sebagian besar aturan ditetapkan oleh masing-masing negara anggota (Khorana & Soo, 2016).

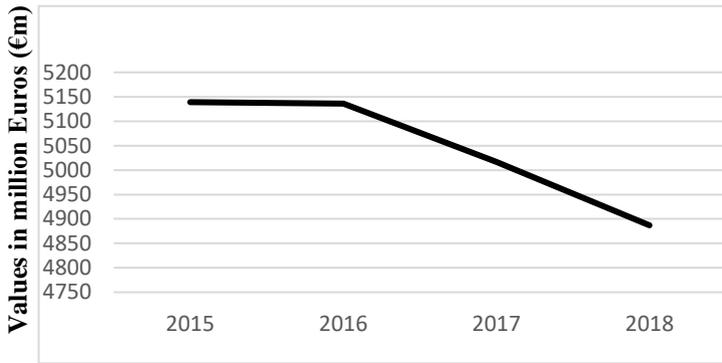
Sebanyak 43% aliran tekstil ke UE berbahan dasar kapas yang boros dalam penggunaan air dan pestisida. Hal ini kemudian menempatkan sektor tekstil India dengan 90%-nya berbahan kapas ke dalam masa kritis. Kurangnya akses perusahaan pada tenaga-tenaga penguji ahli dan laboratorium menjadikan sertifikasi India kurang diterima Uni Eropa. Selain itu, sutra yang menjadi bahan baku terbesar lain juga berkontribusi pada percepatan pemanasan global sementara wol yang menempati urutan ke-6 terbesar dalam sektor produksi India juga menyebabkan akumulasi efek gas rumah kaca (Šajin, 2019). India memiliki *eco label* bernama *eco mark* sejak 1991 yang harus dimiliki eksportir sebagai identifikasi syarat-prasyarat standar global. Namun Denmark, Jerman, dan Italia mengatakan bahwa label tersebut masih minim informasi dan transparansi, memiliki konsep yang membingungkan, teknisi yang buruk, harga yang mahal dan bahkan tidak mengkonversi adanya konsep keberlanjutan (Kumar, Begum, & Das, 2018).

Dari adanya berbagai standar Uni Eropa terkait lingkungan-sosial, kesepakatan FTA yang baru tidak kunjung tercapai. Tidak adanya kesepakatan baru antara India dan Uni Eropa menjadi celah bagi negara eksportir tekstil lain seperti Bangladesh dan Vietnam untuk meningkatkan produktivitas ekspor mereka ke Uni Eropa. Sebelumnya, Bangladesh dan Vietnam telah menikmati *duty free* dari Uni Eropa di bawah skema *Generalised Scheme of Preferences* (GSP) sejak tahun 2006 yang diklasifikasikan untuk negara dengan pendapatan nasional di bawah rata-rata global oleh Bank Dunia (Hayashi,

2007). Sementara beberapa negara menikmati akses bebas tariff impor ke Uni Eropa, produk tekstil India dikenai tariff pajak hingga 9.5% (Fibre2Fashion, 2019). Bangladesh memiliki akses ke inisiatif Uni Eropa *Everything but Arms* (EBA) dan *Duty Free Quota Free* (DFQF) melalui *Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association* (BGMEA) (Wazir Advisors, 2016). Melalui sejumlah keterikatan kerja sama dengan Uni Eropa dan perusahaan yang beroperasi di sana, Bangladesh bahkan hampir melampaui peringkat India sebagai eksportir kain terbesar kedua di dunia (Utrikespolitiska Föreningen, 2018).

Dengan adanya stagnasi dalam perjanjian dagang yang baru (FTA), ekspor India mulai mengalami penurunan di tahun 2008 setelah negosiasi FTA pertama tidak disepakati yang dapat dilihat pada grafik 3.1 di atas. Kompetisi pasar ekspor tekstil dari negara-negara yang memiliki *zero duty* seperti Bangladesh dan Vietnam juga berkontribusi terhadap semakin melemahnya integrasi tekstil India ke Uni Eropa terutama pada tahun 2015-2018 di mana impor pakaian Uni Eropa dari India mengalami penurunan dari €5.2 miliar menjadi €4.8 (*lihat grafik di bawah*) (Sabanoglu, 2019). Standar-standar lingkungan dan sosial yang diinklusi Uni Eropa dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain merupakan salah satu hambatan FTA yang tidak tercapai bagi India. Standar-standar lingkungan dan sosial dalam prasyarat kerja sama Uni Eropa ini menjadi pertimbangan seiring meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia, terutama di Uni Eropa, terhadap isu perubahan iklim dan berbagai isu etisme lain.

Grafik 3.2 Impor Pakaian Uni Eropa dari India tahun 2015-18



Sumber: *Tugba Sabanoglu, diolah oleh Statista 2019*

C. Pengaruh Industri Tekstil Global Terhadap Perubahan Kebijakan Uni Eropa

Industri tekstil, terutama fashion, masuk ke dalam industri dengan sumber daya paling intens namun lemah akan proses daur ulang. Masifnya permintaan jumlah dalam dunia *fashion & mode* menjadikan tekstil sebagai salah satu industri yang memiliki perputaran rantai produksi paling cepat di dunia. Penelitian *Ellen McArthur Foundation* mengungkapkan bahwa produksi pakaian meningkat dua kali lipat dalam 15 tahun terakhir yang dipicu oleh peningkatan masyarakat kelas menengah dan penjualan per kapita di negara industri maju (Drew & Reichart, 2019). Rata-rata konsumen membelanjakan 60% pakaian lebih banyak di tahun 2014 dibanding tahun 2000. Pasar tekstil global bahkan diperkirakan akan mencapai \$1.3 triliun pada tahun 2025 (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). Dilansir dari Greenpeace,

produksi pakaian global akan meningkat hingga 63% di tahun 2030 (Campioni, 2017).

Namun, fenomena *fast fashion* memicu banyak masalah seperti perubahan pada pola tanah dan agrikultur, kualitas air, kesehatan hingga biodiversitas. Dengan kata lain, fashion merupakan salah satu kunci ekonomi utama yang juga memainkan peran dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDG*) karena pada waktu yang bersamaan, industri tersebut menjadi pemicu masalah lingkungan dan sosial (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). *The House of Commons* Inggris tentang Audit Komite Lingkungan mengatakan bahwa perusahaan mendorong konsumen membuang pakaian mereka yang masih bagus karena dinilai sudah ketinggalan zaman (Harrabin, 2018). Rantai pasokan tekstil global memahami hasil dari operasi mereka dapat berujung pada aktivitas deforestasi. Sebanyak lebih dari 70 juta pohon ditebang setiap tahun dan diubah menjadi kain seperti rayon, viscose, modal dan sebagainya (Conca, 2015). Akibatnya, sekitar \$500 juta hilang setiap tahun akibat penggunaan minim dan kurangnya daur ulang pakaian (Dory, 2018).

Bahan baku *fashion* sebagian besar diproduksi oleh negara dunia ketiga dengan hukum ketenagakerjaan yang lemah. Sejak pergantian menuju abad ke-21, para pekerja di seluruh dunia disibukkan dengan berbagai jam tambahan kerja akibat kurva permintaan cepat dan masif yang berujung pada eksploitasi tak terkecuali industri tekstil di mana 75% pekerjanya merupakan wanita (Supriya & Vidya, 2012). Tanpa menyebut nama-nama *brand* papan atas, penelitian dari *University of California* menyebut 85% buruh tekstil bekerja secara eksklusif untuk pengiriman ke Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Beberapa perusahaan memang mulai berusaha untuk menghentikan kekerasan dalam rantai pasokan tekstil, namun mereka belum termotivasi untuk memberikan edukasi mengenai perlakuan terhadap buruh (Ratcliffe, 2019).

Fast fashion juga dikaitkan dengan kondisi kerja yang tidak layak terkait zat berbahaya yang digunakan dalam industri termasuk rantai produksi yang panjang membuat pekerja terjebak dalam jam kerja panjang, tidak memadai dan upah rendah (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). Untuk itu, industri tekstil setidaknya merangkup tiga etika yang diperhatikan masyarakat global; *fair trade* (meliputi kondisi kerja, perlakuan dan upah yang layak), *sustainability* (mengurangi dampak negatif ke lingkungan) dan *slow fashion* (mencakup kualitas produk; tahan lama) (Grant, 2019). Sebanyak 60% produksi tekstil global diproduksi oleh China dan India, dua negara yang sangat bergantung pada industri berbahan bakar batubara (Nature Climate Change, 2018).

Ellen MacArthur Foundation mengungkapkan satu truk atau sekitar 2,265 kg sampah tekstil dibuang setiap detik atau sekitar 700,000 serat pakaian yang dihasilkan dari sampah setiap rumah tangga. Sementara *Copenhagen Fashion Summit* melaporkan 92 juta ton tekstil bertanggung jawab atas penumpukan sampah padat setiap tahun dan membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun agar pakaian yang kita kenakan dapat benar-benar terurai (Drew & Reichart, 2019). Sampah-sampah ini menjadi penyumbang emisi karbon terbesar kedua setelah makanan yang jumlahnya mencapai 1.2 miliar ton di tahun 2015 (Harrabin, 2018). Sebanyak 20% limbah air global diproduksi dari industri fashion yang juga melepaskan 10% emisi gas karbon global, melebihi angka gabungan

dari semua penerbangan dan pelayaran di seluruh dunia (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). Produksi kain serta sintetis juga menghasilkan gas N₂O, yang lebih 300 kali lebih merusak dari CO₂. Laporan *Pulse of the Fashion Industry* bersama GFA dan *the Boston Consulting Group* mengungkap bahwa di tahun 2015, industri tekstil global bertanggung jawab atas konsumsi 79 miliar ton meter air, 1.715 juta ton emisi CO₂, dan 92 juta sampah. Prediksi tahun 2030 bahkan menyebutkan angka-angka di atas akan meningkat sebesar 50% dalam skenario *business-as-usual* (Šajin, 2019). Pertanian kapas juga bertanggung jawab atas penggunaan 24% insektisida dan 11% pestisida meskipun hanya menggunakan 3% dari seluruh tanah subur di dunia (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018).

Seiring waktu, muncul *backlash* terhadap *fast fashion* dan kebiasaan 'sekali pakai'. Dalam 15 tahun terakhir, permintaan fashion beretika yang awalnya dipandang skeptik mulai menjadi pertimbangan dan akhirnya berkembang. Permintaan akan merk berlabel *eco-friendly*, *fair trade* hingga *animal rights* membuat industri pakaian mulai merubah landscape dengan meningkatkan standarisasi kode etik. Para konsumen beretika cenderung menampilkan gaya hidup selektif terkait apa konsekuensi dari membeli dan memakai (khususnya pakaian)/barang tertentu. Menurut sejumlah lembaga survei menyebutkan sekitar 65-70% konsumen di bawah usia 35 tahun di seluruh dunia cenderung memilih produk dari brand atau retail yang berkontribusi pada praktik-praktik etis (Bertelsmann Foundation, 2016).

Berdasarkan penelitian PEFC, 80% konsumen bahkan menginginkan *brand* yang mereka beli memiliki label praktik-praktik bertanggung jawab sesuai dengan

preferensi mereka sementara 54% menghendaki adanya sertifikasi resmi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ramah lingkungan dan mengarusutamakan keberlanjutan. Selain itu, para peneliti mengungkapkan konsumen akan dua kali lebih memilih produk yang berlabel *eco-friendly* dan *fair trade*. Harvard Business Review menyebutkan bahwa label produk pada *brand* pakaian mulai memainkan peran penting akibat pengaruh masyarakat (Moore, 2019). Selain itu, pembeli juga menginginkan adanya transparansi zat yang digunakan dalam pembuatan suatu produk *restricted substances list* (RSL) yang dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan (Kumar, Begum, & Das, 2018).

Namun sejumlah standar baru seperti transparansi dari komposisi produk dan keterlacakan mengenai kondisi lingkungan kerja dan buruh memicu suatu produk memiliki harga jual yang lebih mahal. Meskipun demikian, The Nielsen Company menunjukkan data dari 30.000 konsumen di 60 negara pada tahun 2015, 68% dari mereka siap membayar lebih untuk produk yang menekankan *sustainability*. Penelitian ini meningkat dari hanya 50% saja pada dua tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menekankan keberlanjutan memiliki poin lebih dari pesaing lain (Russell, 2018). Sementara itu, salah satu tesis dari *Stockholm Business School* mengungkapkan bahwa konsumen *fashion* yang hidup di negara demokrasi cenderung mulai memperhatikan kondisi kerja di negara-negara penyuplai bahan baku meskipun sebagian besar menyalahkan pemerintah yang tidak menerapkan aturan ketat terkait pelacakan rantai pasokan, bukan didasarkan pada perilaku individual (Zellweger, 2017). Setidaknya 17 dalam 30 besar negara dengan index demokrasi tertinggi

berasal dari Uni Eropa dengan tujuh negara yang mengadopsi sistem *full democracy* pada survei tahun 2010 (The Economist Intelligence Unit, 2010). Konsumen yang mulai memperhatikan isu-isu lingkungan dan sosial mulai berkembang di Uni Eropa terutama sejak pemanasan global dan banyaknya kasus eksploitasi buruh dalam industri tekstil ditemukan.

Survei menunjukkan bahwa 44% konsumen terlepas dari kategori usia dan pendapatan, mulai membeli pakaian produk lokal atau dalam Uni Eropa di mana aturan *sustainable garment* mengikat dalam rangka menuju *climate neutral* (Grant, 2019). Seiring dengan meningkatnya 77 juta konsumen yang khawatir dengan lingkungan dan etika perdagangan, penjualan pada produk dengan sertifikasi *fairtrade* meningkat menjadi 80% dari €4.38 juta di tahun 2010 menjadi €7.88 juta di tahun 2016 (International Trade Centre & European Commission, 2019). Tahun 2019, sebanyak 2/3 dari konsumen Uni Eropa mengatakan telah beralih pada *brand-brand* yang menekankan praktik positif terhadap lingkungan dan sosial (Schaart, 2019). Sementara survei dari *Morgan Stanley Research* tahun 2016 di Inggris menunjukkan bahwa setengah dari jumlah populasi kaum muda melihat *ethical credential* sebagai sesuatu yang diperhitungkan bahkan dinilai penting (Russell, 2018). Perubahan pola perilaku konsumen ini kemudian menjadi penyebab perubahan *game for brands* untuk memikirkan kelangsungan produknya dengan memperhatikan nilai-nilai etisme termasuk di dalamnya detail informasi terkait bahan baku, produksi hingga upah buruh serta kelayakan lingkungan bekerja.

Dengan adanya berbagai dampak negatif dari industri tekstil global, fenomena pakaian berkelanjutan kemudian

menjadi diskursus baru yang menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan di ranah global. Marie Chartadova, presiden dari *Economic and Social Council* (ECOSOC), mengatakan bahwa industri fashion harus merubah sistem produksi konsumsi. Sementara itu, sekretaris eksekutif *UN Economic Commission for Europe* (UNECE), Olga Algayerova menekankan bahwa sudah saatnya membawa tend fashion yang lebih berkelanjutan (UNECE, 2018). Pada 1 Januari 2016, terdapat 5 dari 17 program pembangunan keberlanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) PBB yang menginklusi keseluruhan proses pada industri tekstil yakni (Richero & Ferrigno, 2017):

1. Kesetaraan gender (SDG 5)
2. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8)
3. Industri, inovasi dan infastruktur (SDG 9)
4. Mengurangi ketidakadilan (SDG 10)
5. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab (SDG 12)
6. *Climate action* (SDG 13)

Uni Eropa, pasar ekspor utama tekstil India, mendeklarasikan diri sebagai pusat *sustainable apparel*. Seiring dengan meningkatnya masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan etika perdagangan, Komisi Eropa pada tahun 2018 menyatakan bahwa kawasan tersebut mulai kritis dengan sumber yang berkelanjutan; yang minim kerusakan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, regulasi yang jelas dan memadai hingga kondisi kerja yang layak (International Trade Centre & European Commission, 2019). Sebagai bagian dari *Fashion Revolution*, UE membentuk platform *the centre for the promotion of imports* (CBI) di bawah Kementerian Luar Negeri Uni Eropa yang memberi panduan standar ekspor

ke Uni Eropa. Uni Eropa mengharuskan deskripsi produk berisikan transparansi terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial termasuk di dalamnya kualitas, material, label hingga *simple packaging* yang disepakati melalui *Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textiles* sejak tahun 2018 dengan target implementasi hingga 80% di tahun 2020 (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019).

Beberapa dekade lalu, produksi tekstil di dalam Uni Eropa cukup berkembang. Namun, pemberian kuota tekstil oleh rezim perdagangan internasional (WTO) meningkatkan konsumsi impor dari 33% di tahun 2004 menjadi 84% di tahun 2012 dan terus meningkat. Komisi Eropa mencatat di tahun 2015, China, India, Bangladesh, Vietnam, Kamboja dan Turki menjadi eksportir tekstil utama ke UE (Šajin, 2019). Kerangka Uni Eropa terkait tekstil sudah dirancang sejak tahun 1970-an. Seiring waktu, kawasan supranasional tersebut mulai menginklusi sistem transparansi dan keberlanjutan melalui sejumlah regulasi dalam *European Standards* (Cone, 2006). Dalam *European Standards*, terdapat setidaknya dua label; (1) CEN/TS yang merujuk pada klaim lingkungan dalam lingkaran tekstil, dan (2) EU ecolabel yang mencakup kriteria ekologis termasuk penggunaan bahan kimia dan air. Adapaun instrument legal yang diaplikasikan untuk negara anggota yaitu *The EU Green Public Procurement* (GPP) (Šajin, 2019).

Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) merupakan regulasi Uni Eropa yang digagas di tahun 2006 dan diimplementasikan tahun 2007 sebagai standar penggunaan bahan kimia dalam produk-produk yang mengalir di Eropa yang memiliki potensi dampak pada

lingkungan dan kesehatan. Regulasi yang memakan waktu hingga tujuh tahun ini merupakan kebijakan paling penting bagi Uni Eropa dan aturan paling ketat yang mempengaruhi industri di seluruh dunia karena mengatur hingga lebih dari 30.000 zat kimia (Cone, 2006). Dalam sektor tekstil, regulasi Uni Eropa terkait lingkungan membatasi penggunaan pewarnaan amina yang mengandung cadmium dan zat merkuri untuk tahap akhir pakaian hanya <30 *part per million* (Khorana, Yeung, Perdikis, & Kerr, 2010). Karena pemerintah dan perusahaan-perusahaan India memiliki akses yang kurang ke ruang laboratorium serta komponen pengujian lain, sebagian besar akreditasi dan hasil tes tidak dikenali oleh pengimpor dari Uni Eropa. Selain itu, pengimpor meminta agar ekspor tekstil India diuji dan disertifikasi oleh agen-agen resmi yang diakui Uni Eropa seperti *SGS Testing, Specialised Technology Resources Inc.* atau laboratorium-laboratorium yang berada di kawasan Uni Eropa (Khorana & Soo, 2016).

Tahun 2011, Parlemen Eropa mulai memberi obligasi bagi negara anggota untuk mencantumkan label proses industri dan distribusi serta komposisi bahan yang masuk dalam *Textile Regulation of 2011* (International Trade Centre & European Commission, 2019). Parlemen Eropa juga menetapkan seluruh pabrik di dalam kawasan harus melabeli semua produk non-makanan mulai April 2014. Di tahun 2015, Dewan Eropa mendeklarasikan secara resmi pengadopsian *SDGs* melalui dokumen *EU and the Responsible Global Value Chains* yang dipublikasi secara online pada Januari 2017. Di dalam dokumen berisi 12 poin tersebut terdapat kalimat bahwa semua negara maju atau negara yang sedang dalam pertumbuhan ekonomi harus mengalamatkan isu *behind-the-border* seperti

fasilitas perdagangan, standard dan regulasi teknis, regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan, investasi dan sebagainya (Richero & Ferrigno, 2017). Garis besar dalam dokumen ini mengindikasikan bahwa agenda promosi pembangunan keberlanjutan Uni Eropa ke lingkup global mulai terealisasi dengan sejumlah aturan standar impor ke kawasan tersebut dan perputaran kerja sama internal.

Pada April 2017, kebijakan ekspor tekstil ke UE semakin diperketat dengan munculnya aturan legal melalui *EU Flagship Initiative* oleh Parlemen dan Komisi Eropa bagi perusahaan-perusahaan UE untuk melacak rantai suplai produksi di negara-negara ketiga terkait isu tenaga kerja dan lingkungan (Šajin, 2019). Di tahun 2016, Parlemen Eropa juga mengadopsi sejumlah kebijakan atas penggunaan kapas dalam rantai produksi global yakni *Better Cotton Initiative* (BTI), *the Global Organic Textile Standard* (GOTS) dan beberapa inisiatif lain bersama para penanam modal yang bekerja melalui *The International Cotton Advisory Committee* yang bertujuan untuk meminimalisir dampak degradasi lingkungan. Sebagian besar pengecer Uni Eropa juga mulai melakukan revolusi *greening* dalam rantai suplai mereka seiring meningkatnya permintaan konsumen yang peduli akan etika perdagangan dan preferensi lingkungan (International Trade Centre & European Commission, 2019). Namun, *fashion* diproduksi dalam lingkaran produksi yang kompleks.

Pada tahun 2018, UE bahkan secara resmi memasukan tekstil ke dalam sirkularitas ekonominya dan menjamin anggotanya untuk mengadopsi kebijakan yang sama di tahun 2025 yang mana hal tersebut merupakan pukulan bagi pemasok dari dunia ketiga (Šajin, 2019). Melalui *EU's Waste Framework Directive*, negara anggota diminta untuk memilah-milah sampah tekstil termasuk

memisahkannya dengan tekstil yang mengandung bahan kimia berbahaya hingga tahun 2025 (Schaart, 2019). Akibat adanya penekanan pada sejumlah regulasi internal atau dapat dilihat oleh para pihak kedua sebagai *Eurozone Protectionist Agenda*, beberapa eksportir dari luar kawasan harus mencari celah melalui strategi agar produknya dapat memenuhi standar konsumen di kawasan dengan harga yang lebih rendah.

Dengan adanya berbagai kekhawatiran lingkungan yang disisi lain menginklusi hak-hak buruh tekstil, rantai tekstil global perlu mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan. Ketika pakaian dapat digunakan sebanyak dua kali atau lebih, keluaran gas rumah kaca dapat menurun hingga 44%. Menurut laporan *Pulse of the Fashion Industry* tahun 2018, perusahaan-perusahaan berbasis pakaian olahraga dan brand-brand ternama mulai menginvestasikan modal pada teknologi yang berkelanjutan terkait kekhawatiran akan hilangnya jumlah konsumen (Šajin, 2019). India sebagai salah satu pemasok tekstil ke Uni Eropa dapat menghadapi penurunan ekspor yang berkelanjutan apabila tidak segera menyesuaikan standar di kawasan tersebut. Dengan target mencapai *\$5 trillion* pada tahun 2025, penurunan kapasitas ekspor tekstil ke Uni Eropa sebagai pasar utama tentu dapat memperlambat misi India.

D. Kesimpulan

India mempreferensikan Uni Eropa sebagai pasar utama bagi produk tekstilnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor tekstil India ke *single market* terbesar tersebut mengalami penurunan. Adanya klausul lingkungan dan sosial yang dibawa dalam kerangka kerja sama Uni Eropa menjadi salah satu kendala perjanjian

dagang yang baru (FTA) antara India dan Uni Eropa belum tercapai. Akibat stagnasi perjanjian dagang tersebut, sejumlah pesaing eksportir tekstil seperti Bangladesh dan Vietnam memperoleh kuota lebih di Uni Eropa yang memperoleh akses *zero duty* dalam skema GSP. Dari adanya isu lingkungan dan sosial itulah yang menyebabkan akses ekspor tekstil India ke Uni Eropa menurun dan diperparah dengan masuknya sejumlah kompetitor lain ke dalam ranah pasar tekstil di Uni Eropa. Seiring naiknya kekhawatiran sosial lingkungan di Uni Eropa, India mulai mempertimbangkan kebijakan untuk mengakomodasi sejumlah aturan main yang baru untuk dapat mengakses kembali pasar tekstil Uni Eropa.